

Confidence Building Measure (CBM)

Korea Selatan Terhadap Tiongkok

Strategi Normalisasi Hubungan Diplomatik Pasca Boikot Ekonomi Tahun 2016

Tutut Paramita Sugiyanti¹
Tulus Yuniasih²

Abstract

In July 2016, South Korea and the United States agreed to install the THAAD system in South Korea. This is a defense measure taken by South Korea because of North Korea's nuclear test activities that is considered as a threat. However, the action that is considered a step towards self-defense for South Korea is actually considered a threat to China. In results, China put sanction towards South Korea in form of an economic boycott. This study aims to analyze the strategies used by South Korea in improving diplomatic relations between South Korea and China after the boycott. In analyzing the case, the authors uses the concept of action-reaction patterns, security dilemma, and confidence building measures. Periodization of research was limited between 2016 – 2019, after China began to implement the economic boycott over South Korea until an agreement was reached to normalize relations between the two countries. The results of this study indicate that the enactment of economic boycotts carried out by China against South Korea has created severe impacts on South Korea's economy and security. CBMs was then implemented by South Korea as its strategy to normalize and improve relations, as well as build mutual trust between the two countries.

Keywords: *diplomatic relations, economic boycott, strategy, China, South Korea*

Pendahuluan

Hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok memburuk karena Amerika Serikat mengumumkan akan memasang sistem THAAD di Korea Selatan. Pengumuman ini dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 2016 (Swaine, 2017: 1). THAAD adalah sistem pertahanan canggih yang dimiliki Amerika Serikat. Pemasangan THAAD ini dipicu oleh uji coba senjata nuklir oleh Korea Utara. Korea Selatan menganggapnya sebagai ancaman, sehingga sebagai langkah pertahanan keamanan, Korea Selatan melakukan kesepakatan kerjasama dengan Amerika Serikat. Pengumuman pemasangan THAAD di Korea Selatan

¹ Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Budi Luhur, Jakarta. Email: tututparamitha32@gmail.com

² Dosen Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Budi Luhur, Jakarta

mendapatkan banyak perhatian dan respon dari sekitar kawasan, termasuk Tiongkok yang memberikan respon negatif. Pada hari diumumkannya pemasangan THAAD di Korea Selatan, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengajukan keluhan pada Duta Besar Korea Selatan. Alasan keberatan Tiongkok atas rencana pemasangan sistem THAAD ini adalah cakupan dari sistem THAAD diperkirakan melampaui kebutuhan pertahanan Semenanjung Korea. Hal ini dianggap dapat mengancam keamanan strategis Tiongkok dan negara-negara lain yang berada di kawasan tersebut.

Dampak yang didapatkan Korea Selatan setelah pengumuman pemasangan THAAD adalah Tiongkok menutup akses diplomatik Korea Selatan. Duta Besar Korea Selatan dibiarkan tidak aktif, hingga Pertunjukkan Udara Tiongkok yang diadakan di Zhuhai melarang adanya partisipasi dari Korea Selatan (Chung, 2018: 79). Selain itu, banyak program antara Korea Selatan dan Tiongkok yang dibatalkan secara tiba-tiba tanpa adanya alasan yang jelas, seperti program pertukaran kebudayaan yang sudah disetujui pemerintah kota Qingdao dan pemerintah kota Daegu yang akan dilaksanakan di kota Qingdao, serta Universitas Shandong yang membatalkan konferensi dengan para sarjana Korea Selatan.

Tiongkok tidak hanya melakukan protes dengan menutup akses diplomatik kepada Korea Selatan. Tindakan yang dilakukan Tiongkok dalam mengatasi isu pertahanan ini juga mencakup aspek ekonomi, yaitu dengan memberikan sanksi berupa boikot ekonomi. Kegiatan boikot ini antara lain boikot tayangan televisi Korea Selatan, boikot pariwisata, dan boikot perusahaan-perusahaan Korea Selatan (Permatasari, 2019: 1024). Boikot ini dimulai sejak Agustus 2016, diawali dengan salah satu jaringan televisi Tiongkok yaitu Jiangsu yang memotong penampilan artis Korea Selatan dalam salah satu program acaranya. *China Central Television (CCTV)* yang merupakan saluran televisi milik negara, melaporkan bahwa regulator siaran pemerintah telah melarang penayangan program televisi milik Korea Selatan (Meick dan Salidjanova, 2017: 7). Tidak hanya dalam program televisi, beberapa acara penampilan musik pop Korea, seperti konser dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Perusahaan-perusahaan Korea Selatan turut terkena boikot, seperti perusahaan otomotif, kosmetik, dan elektronik. Salah satu perusahaan adalah Lotte, hal ini dikarenakan Lotte mengizinkan lahan golfnya yang berada di Seongju, Korea Selatan, dijadikan tempat pemasangan THAAD (Yonhap, 2017). Boikot di bidang pariwisata dimulai pada 3 Agustus 2016, Tiongkok membatalkan dan menghentikan pelayanan pembuatan visa, serta *China's National Tourism Administration (CNTA)* mengeluarkan instruksi untuk agensi traveler Tiongkok mengurangi penerimaan jumlah wisatawan ke Korea Selatan hingga 20% (Swaine, 2017: 2). Dapat dilihat bahwa Tiongkok menjadi salah satu negara yang berpengaruh bagi Korea Selatan, terutama dalam bidang ekonomi. Tentu dengan diberlakukannya boikot ekonomi, akan memberikan dampak yang buruk bagi Korea Selatan, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga pada hubungan diplomatik di antara kedua negara tersebut.

Oleh karena itu, Korea Selatan memerlukan pelaksanaan strategi yang mampu memperbaiki keadaan di negaranya. *Confidence Building Measure (CBM)* merupakan suatu tindakan yang digunakan untuk mengatasi, mencegah atau menyelesaikan permasalahan antar negara (Centre for Strategic & International Studies, 2019). CBM digunakan untuk mencegah peningkatan masalah dan juga untuk membangun rasa saling percaya antar negara. CBM dapat bersifat formal atau informal, unilateral, multilateral atau bilateral, militer atau politik. Tindakan ini merupakan upaya dari menangani dan menyelesaikan permasalahan politik dengan jangka panjang. Tindakan yang digunakan dapat berupa melakukan pendekatan demi menurunkan situasi konflik. Tulisan ini kemudiannya menganalisis langkah Korea Selatan untuk melakukan upaya normalisasi hubungan dengan Tiongkok dalam kacamata CBM. Analisis CBM dilakukan ke

atas upaya Korea Selatan dalam melakukan pendekatan dengan Tiongkok untuk dapat meredakan konflik antara Korea Selatan dan Tiongkok, termasuk boikot ekonomi, serta meningkatkan rasa saling percaya di antara kedua negara.

Pembahasan

Aksi boikot ekonomi yang dilakukan Tiongkok memberikan dampak pada perekonomian Korea Selatan. Sektor yang paling terkena dampak boikot ekonomi ini adalah sektor hiburan dan pariwisata. Dalam sektor hiburan, Korea Selatan dikenal dengan *Korean Wave* atau *Hallyu*. Adanya bintang-bintang pop dan aktor Korea Selatan yang membintangi drama terkenal dapat memberikan pengaruh yang besar. Namun, dengan memburuknya hubungan Korea Selatan dan Tiongkok, serta diberlakukannya boikot ekonomi, Korea Selatan mengalami dampaknya. Perusahaan-perusahaan penyiaran lokal yang peratama terkena dampak, 58 dari 160 perusahaan media dan hiburan lokal mengalami pembatalan kontrak.

Pada sektor Pariwisata, Korea Selatan mengalami kerugian besar. Menurut data *National Assembly's Budget Office* (NABO), kerugian di sektor pariwisata mencapai 7,5 triliun won Korea. Lebih spesifik lagi, industri ritel mengalami penurunan hingga 4,9 triliun won dan industri perjalanan mengalami penurunan hingga 1,1 triliun won (Yonhap, 2017). Pada November 2016, jumlah turis hanya 516.956 orang. Tiongkok memperketat larangannya pada Maret 2017, sehingga jumlah turis yang datang menjadi 360.782 orang bahkan 227.811 orang. Penurunan jumlah wisatawan ke Korea Selatan ini menyebabkan Seoul menutup beberapa grup wisata dan restoran yang khusus melayani wisatawan Tiongkok. Citra Korea Selatan sebagai tujuan wisata juga akan rusak.

Lotte adalah perusahaan individu yang paling besar terkena dampaknya. Keputusan dari Lotte untuk mengizinkan salah satu lapangan golfnya untuk dijadikan tempat pemasangan THAAD, dianggap sebagai pengkhianatan kepada Tiongkok. Hal ini menyebabkan pemerintah ikut memberikan sanksi kepada Lotte dengan memboikot seluruh produk Lotte. Selain itu, Pemerintah Tiongkok juga memerintahkan Lotte untuk menutup sementara gerainya. Penutupan sementara gerai Lotte ini diperkirakan akan mengakibatkan kerugian hingga 300 miliar won (Jung, 2017). Pada bulan Mei 2016, gerai Lotte yang ditutup paksa mencapai 74 unit, dengan alasan inspeksi keamanan dan kebakaran. Sedangkan 13 gerai Lotte lainnya ditutup karena adanya protes anti-Korea oleh warga Tiongkok (Mutmainnah, 2018: 39). Hampir seluruh gerai Lotte tidak beroperasi kembali, dan hanya mengoperasikan sisa 12 gerai. Tetapi dalam mengoperasikan gerai ini tetap dibutuhkan banyak perjuangan untuk mendapatkan pelanggan. Karena kondisi perusahaannya yang semakin menurun, CEO dari Lotte, yaitu Shin Dong-Bin melakukan pembelaan. Shin Dong-Bin mengeluarkan pernyataan bahwa ini hanya kesalahpahaman. Shin Dong-Bin tidak dapat menolak permintaan pemerintah untuk melakukan penukaran lahan. Terlebih hal ini menyangkut masalah keamanan nasional.

Sejak Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan kesepakatan dalam pemasangan sistem THAAD di Korea Selatan, negara yang paling dibenci rakyat Korea Selatan berubah. Dengan melakukan aksi boikot ekonomi terhadap Korea Selatan, Tiongkok menjadi negara yang paling dibenci oleh rakyat Korea Selatan (Kompas, 2017). Dalam sebuah survey yang dilakukan oleh Institut Studi Kebijakan Asan menunjukkan bahwa popularitas Jepang lebih tinggi dibandingkan Tiongkok. Jika popularitas negara Tiongkok pada Januari 2017 mencapai 4,31%, pada bulan Maret 2017 turun menjadi 3,21%. Dalam perbandingan antara Jepang dan Tiongkok, rakyat Korea Selatan lebih menyukai Jepang dengan persentase 3,33% dibandingkan Tiongkok 3,21%. Dalam survey ini juga dapat diketahui bahwa rakyat Korea Selatan mendukung pemasangan

sistem THAAD, meskipun pada awalnya melakukan penolakan. Tidak berbeda jauh dengan rakyat Tiongkok, dengan berlandaskan rasa nasionalisme, rakyat Tiongkok ikut serta dalam aksi boikot terhadap Korea Selatan.

Selain tekanan ekonomi tersebut, Korea Selatan juga mengalami tekanan diplomatik langsung ataupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan beberapa kecelakaan dan insiden, penyebaran informasi dan manipulasi media untuk membentuk opini dan pemahaman Pro-Tiongkok, dan berbagai macam diplomasi publik dalam berbagai bidang yang dapat menguntungkan Tiongkok. Anggota parlemen Korea Selatan berupaya dalam memperbaiki sikapnya dalam memberikan tanggapan terhadap seruan protes yang diberikan oleh Tiongkok. Tetapi, upayanya ini tidak dapat dijalankan karena Tiongkok yang selalu menolak untuk melakukan pertemuan. Sehingga, tidak dapat dilakukannya diskusi langsung antara kedua pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Pada tanggal 10 Mei 2017, Moon Jae In resmi menjadi Presiden Korea Selatan, menggantikan presiden sebelumnya, Park Geun Hye. Terpilihnya Presiden Moon Jae In merupakan sebuah awal dari dimulainya upaya-upaya untuk memperbaiki hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok. Diawali dengan ucapan selamat dari presiden Tiongkok, Xi Jinping, kepada Presiden Moon Jae In melalui telepon. Tentu upaya yang dilakukan beragam, dimulai dari dilakukannya pendekatan dengan Tiongkok untuk dapat menyelesaikan permasalahan boikot ekonomi, hingga dijalinnya hubungan kerjasama antar dua negara untuk mempertahankan hubungan dalam jangka panjang.

Peningkatan Kunjungan Antar Negara

Dalam memperbaiki hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok, langkah awal yang dilakukan oleh Korea Selatan adalah dengan melakukan pertemuan kenegaraan dengan Tiongkok. Pertemuan pertama adalah dengan dikirimnya delegasi-delegasi oleh Presiden Moon Jae In setelah mendapat ucapan selamat dari Presiden Xi Jinping melalui sambungan telepon. Dalam pembicaraan sambungan telepon ini, Presiden Moon Jae In mengungkapkan rencananya yang akan mengirimkan delegasi ke Beijing (Choe, 2017). Park Byung Seok, mantan wakil ketua Majelis Nasional mengikuti konferensi *One Belt, One Road* yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Mei 2017 (Snyder & Byun, 2017). Pada awalnya, Korea Selatan tidak mengirim perwakilannya karena tidak adanya undangan dari Tiongkok untuk menghadiri Konferensi *One Belt One Road* (Hankyoreh, 2017b). Namun, Presiden Xi Jinping memberikan ucapan selamat kepada Presiden Moon Jae In melalui telepon. Hal ini dianggap sebagai tanda yang bagus untuk kembali membangun hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok. Pertemuan ini merupakan langkah pertama dari Korea Selatan dalam memperbaiki hubungan dengan Tiongkok. Korea Selatan mengajak Tiongkok untuk membicarakan masalah THAAD yang memungkinkan kedua pihak untuk bertukar pandangan terkait pemasangan THAAD di Korea Selatan (Hankyoreh, 2017a).

Presiden Moon Jae In juga mengirim delegasi khusus, yang dipimpin oleh Lee Hae Chan, mantan Perdana Menteri. Kunjungan ini berlangsung pada tanggal 18-20 Mei 2017 (Chung, 2018: 81). Dalam pertemuan ini, para pejabat Tiongkok menuntut Korea Selatan untuk menghilangkan hambatan dari hubungan Korea Selatan dan Tiongkok. Tentu yang dimaksud dengan hambatan disini adalah pemasangan THAAD di Korea Selatan. Selanjutnya, diadakannya KTT Presiden Moon Jae In dan Presiden Xi Jinping di G-20 di Jerman dilaksanakan pada 6 Juli 2017. Dalam pertemuan ini, meskipun kedua belah pihak mengakui bahwa penting bagi mereka untuk memperbaiki hubungan, nyatanya tidak terjadi kesepakatan di antara Korea Selatan dan Tiongkok. Presiden Xi Jinping menuntut agar kepentingan inti Tiongkok dapat dilindungi jika ingin hubungan di antara kedua membaik. Namun, Presiden Moon Jae In tidak dapat memenuhi hal

tersebut setelah pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pertemuan dengan Donald Trump dilakukan beberapa hari sebelum KTT di Jerman, dengan persamaan tujuan dari kedua kepala negara, yaitu dapat membuat Korea Utara meninggalkan pengembangan program nuklir dan rudal. Dalam pertemuan tersebut THAAD didefinisikan sebagai keputusan bersama aliansi dan harus dihormati (Berlinger, 2017).

Upaya yang dilakukan Presiden Moon Jae In untuk menjalin hubungan erat antara Amerika Serikat dan Tiongkok adalah menunda pemasangan empat baterai THAAD yang tersisa. Selain itu adalah mengumumkan bahwa penilaian lingkungan umum wilayah pemasangan THAAD bisa memakan waktu hingga 15 bulan. Namun, setelah dilakukannya KTT, menjelang tengah malam, Korea Utara meluncurkan Hwasung-14 ICBM-nya (Chung, 2018: 81). Dua jam kemudian, Korea Selatan memutuskan untuk mengerahkan keempat baterai yang tersisa sedini mungkin. Meskipun hanya sementara hingga penilaian lingkungan umum selesai. Upaya yang dilakukan oleh Presiden Moon Jae In terpaksa harus digagalkan.

Tidak adanya kesepakatan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Presiden Moon Jae In memberikan penawaran berupa *Three Noes* pada pertemuan *State Affairs Position* di Majelis Nasional pada tanggal 30 Oktober 2017 (Abrahamian dan Son, 2017). Kang Kyung Wha, Menteri Luar Negeri menyatakan: 1.) Pemerintah Korea Selatan tidak mempertimbangkan pemasangan tambahan THAAD; 2.) tidak ada perubahan dalam sikap lama bahwa Seoul tidak akan bergabung dengan system MD Amerika; 3.) Kerjasama keamanan trilateral antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang tidak akan berkembang menjadi aliansi militer. Korea Selatan menganggap bahwa poin dari *Three Noes* ini adalah kunci untuk memperbaiki hubungan dengan Tiongkok. Korea Selatan meyakinkan Tiongkok bahwa dengan *Three Noes*, Korea Selatan akan mengubah *status quo* di Asia Timur.

Namun, pada tanggal 31 Oktober 2017, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan Tiongkok memposting sebuah pernyataan di situs web mereka yang menghasilkan kontroversi (Easley, 2017). Dalam pernyataan tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi kontroversi. Pertama, judul yang berbeda, pada judul Korea Selatan, terdapat kata "meningkatkan" yang dimana mengarah pada hubungan Korea Selatan dan Tiongkok. Namun, Tiongkok (yang berada di dalam kurung) tidak memasukkan kata tersebut pada judulnya. Banyak pejabat yang mengatakan bahwa ini bukan hal yang sepele. Kedua, kritikan bahwa Wakil Kepala Korea Selatan dari Kantor Keamanan Nasional (tingkat wakil menteri) dipasangkan dengan wakil menteri Tiongkok dalam negosiasinya. Terlebih, fakta bahwa Nam bukanlah Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Ketiga, dalam pernyataan tersebut hanya kepentingan-kepentingan Tiongkok saja yang ditekankan. Sedangkan permasalahan Korea Selatan, seperti pentingnya pemasangan THAAD untuk mengatasi ancaman dari Korea Utara tidak dicantumkan sama sekali.

Meskipun banyak permasalahan pada pernyataan tersebut, Korea Selatan tetap menyetujui pernyataan tersebut. Walaupun pada nyatanya tidak dapat menyelesaikan perbedaan dengan Tiongkok sekaligus. Hal ini tentu salah satu jalan untuk Presiden Moon Jae In tetap dapat menjalankan rencananya yang telah disusun. Presiden Moon Jae In tentu tetap ingin memperbaiki hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok, mengatur kunjungan kenegaraan Presiden Moon Jae In ke Tiongkok sebelum akhir tahun, mengundang Presiden Xi Jinping ke Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang, dan memfasilitasi pertemuan puncak antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump, untuk kemudian membuka jalan menuju penyelesaian damai masalah Korea Utara.

Setelah penawaran *Three Noes* oleh Korea Selatan pada pertemuan 30 Oktober 2017, hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok mulai menemui titik terang. Hubungan di antara kedua negara sudah menunjukkan tanda-tanda membaik. Presiden Moon Jae In dan Presiden Xi Jinping kembali melakukan pertemuan di sela KTT *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) pada tanggal 11 November 2017 di Danang, Vietnam (Permatasari, 2019: 1028). Dalam pertemuan ini, kedua kepala negara tersebut sepakat untuk menyetujui kesepakatan yang telah dibuat pada 30 Oktober 2017. Tujuan dari adanya pertemuan ini adalah upaya untuk menghentikan aksi boikot.

Pertemuan kembali dilakukan di Beijing atas undangan Presiden Xi Jinping. Meskipun begitu, pada pertemuan yang diselenggarakan di Beijing pada 14 Desember 2017, Korea Selatan masih berada dalam boikot ekonomi (Choi, 2018). Dari pertemuan ini, peningkatan hubungan Korea Selatan dan Tiongkok akhirnya dapat menyelesaikan permasalahan di Semenanjung Korea. Kedua negara menyetujui bahwa solusi damai dan diplomatik merupakan hal yang penting. Dengan membaiknya hubungan di antara kedua negara juga dapat digunakan sebagai jalan untuk dapat menyelesaikan masalah dengan Korea Utara. Korea Selatan juga menekankan bahwa untuk selanjutnya akan meningkatkan kerjasama dengan Tiongkok dibandingkan dengan pemberian sanksi jika mengalami perselisihan kembali. Dalam mencapai kesepakatan ini, Korea Selatan dan Tiongkok masing-masing menurunkan sensitifitas diplomatik mereka. Tiongkok juga telah memutuskan bahwa hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok sudah pada titik dimana keduanya melakukan kerjasama tidak hanya dalam hal keamanan, tetapi juga dalam hal ekonomi. Pertemuan ini menandai bahwa berakhirnya masalah boikot ekonomi oleh Tiongkok terhadap Korea Selatan.

Untuk tetap menjaga hubungan yang telah membaik dan dapat bertahan dalam jangka panjang, Korea Selatan dan Tiongkok kembali melakukan pertemuan pada 27 Juni 2019 di Osaka, Jepang (Yonhap, 2019). Dalam pertemuan ini, Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa Tiongkok mendukung upaya dari Korea Selatan untuk perdamaian regional dan meningkatkan hubungan di antara kedua negara. Media menyebarkan bahwa Tiongkok akan berkontribusi dalam menjaga perdamaian serta stabilitas regional. Presiden Moon Jae In sendiri mengantisipasi akan adanya diskusi mendalam dengan Presiden Xi Jinping mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mempromosikan perdamaian dan kemakmuran untuk kawasan. Dalam KTT ini juga Presiden Moon Jae In mencatat perjalanan Presiden Xi Jinping ke Korea Utara selama dua hari. Tujuan dari kunjungan Presiden Xi Jinping ke Korea Utara adalah untuk melakukan pembicaraan dengan Kim Jong Un, Presiden Korea Utara. Kunjungan Presiden Xi Jinping ini merupakan sebagai bentuk kontribusi Tiongkok pada denuklirisasi penuh Semenanjung Korea dan untuk membentuk perdamaian kawasan yang dapat bertahan lama. Dalam KTT ini, Presiden Moon Jae In mengharapkan Tiongkok agar selalu dapat melakukan peran konstruktif, dan disetujui oleh Presiden Xi Jinping. Selain itu, kedua kepala negara tersebut setuju untuk mempercepat proses dialog untuk mencapai tujuan denuklirisasi dan perdamaian.

Kerjasama antara Korea Selatan dan Tiongkok dalam Sektor Ekonomi

Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama yang dilakukan oleh Tiongkok dan Korea Selatan untuk tetap mempertahankan hubungan kedua negara yang membaik. Kedua kepala negara tersebut bersepakat untuk memperluas kerjasama mereka yang sebelumnya hanya ekonomi, perdagangan, masyarakat, budaya dan pertukaran *people-to-people*. Kini, kerjasama antara Korea Selatan dan Tiongkok meluas hingga sektor politik, diplomasi dan keamanan. Pada 22 Maret 2018, perwakilan dari Korea Selatan dan Tiongkok kembali memulai pembahasan tentang perluasan poin jasa dan investasi FTA yang telah dilakukan kesepakatan pada tahun 2015 (Permatasari, 2019: 1028).

Dalam industri jasa dan budaya, memungkinkan untuk memasuki pasar Tiongkok, tetapi hanya yang dapat diterima oleh banyak masyarakat Tiongkok. Pertukaran produk budaya yang dapat memperkuat hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok akan disetujui oleh pemerintah sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan bilateral. Namun sebaliknya, produk budaya yang menimbulkan ancaman terhadap konstruksi budaya di Tiongkok, tidak akan mendapatkan izin untuk memasuki pasar Tiongkok. Pada sektor pariwisata, Tiongkok membuka kembali akses untuk melakukan perjalanan ke Korea Selatan bagi masyarakat Tiongkok yang ingin melakukan perjalanan wisata ke Korea Selatan. Setelah dibuka kembali akses perjalanan wisata, tentu diharapkan keadaan kembali pulih. Hal ini juga mempengaruhi pengembangan industri yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan pariwisata.

Hasil yang didapat oleh kedua pihak adalah kepentingan masing-masing negara yang dapat terpenuhi. Tiongkok merasa dengan disetujuinya *Three Noes*, ancaman untuk negara akan berkurang. Terlebih, Tiongkok dapat menahan Korea Selatan untuk mempererat hubungan dengan Amerika Serikat, terutama dalam hal keamanan. Hal ini juga dapat diperoleh karena kedua negara mementingkan *status quo*. Bagi Tiongkok sendiri, *status quo* sangat penting sebagai upaya untuk menjaga keamanan kawasan Asia Timur. Korea Selatan juga dapat memulihkan kondisi ekonominya di pasar Tiongkok.

Kesimpulan

Confidence building measure (CBM) digunakan untuk menyelesaikan permasalahan antar negara. Tindakan yang dilakukan berupa melakukan pendekatan untuk dapat mengatasi masalah dan membangun rasa saling percaya antar negara. Dalam penelitian ini, Korea Selatan dan Tiongkok adalah negara yang memiliki permasalahan. Tiongkok menjatuhkan sanksi kepada Korea Selatan yaitu berupa boikot ekonomi karena pemasangan sistem THAAD di Korea Selatan. Dengan dampak yang dialami Korea Selatan dari adanya sanksi boikot ekonomi, Korea Selatan memerlukan strategi untuk mengatasi permasalahan ini.

Korea Selatan melakukan berbagai upaya normalisasi hubungan dengan Tiongkok. Pertama adalah dengan melakukan pendekatan kepada Tiongkok. Pendekatan yang dilakukan berupa diadakannya pertemuan dan kunjungan kenegaraan. Pertemuan dan kunjungan yang dilakukan oleh kedua negara dilakukan untuk dapat dicapainya sebuah kesepakatan untuk memperbaiki hubungan yang merenggang di antara kedua negara. Hasil dari dilakukannya upaya-upaya normalisasi antara Korea Selatan dan Tiongkok adalah mulai dicabutnya sanksi boikot ekonomi oleh Tiongkok, meskipun tidak secara keseluruhan. Namun, dalam sektor industri budaya dan hiburan, program-program milik Korea Selatan sudah dapat ditayangkan di saluran televisi Tiongkok. Larangan untuk melakukan perjalanan wisata ke Korea Selatan oleh masyarakat Tiongkok juga dicabut untuk beberapa jenis transportasi. Bahkan kerjasama dalam perdagangan juga mulai kembali meningkat.

Referensi

- Abrahamian, Andray dan Daekwon Son. (2017). "Moving On: China Resolves THAAD Dispute with South Korea". *38North*. Diakses dari <https://www.38north.org/2017/11/abrahamianson110917/> pada tanggal 1 Agustus 2019.
- Berlinger, Joshua. (2017). "North Korea Casts Shadow as Trump and Moon Meet for First Time". *CNN*. Diakses dari <https://edition.cnn.com/2017/06/28/asia/south-korea-moon-jae-in-donald-trump-meeting/index.html> pada tanggal 1 Agustus 2019.
- Centre for Strategic & International Studies. (2019). "Confidence-Building Measures." Diakses dari <https://www.csis.org/programs/international-security-program/isp-archives/asia-division/cross-strait-security-initiati-1> pada tanggal 21 Juli 2019.
- Choe, Sang Hun. (2017). "Moon Jae-In of South Korea and China Move to Soothe Tensions". *New York Times*. Diakses dari <https://www.nytimes.com/2017/05/11/world/asia/china-south-korea-moon-jae-in.html> pada tanggal 1 Agustus 2019.
- Choi, Kang. (2018). "South Korea". *The Asan Forum*. Diakses dari <http://www.theasanforum.org/south-korea/> pada tanggal 27 Juni 2019.
- Chung, Jae Ho. (2018). "South Korea's Strategic Approach to China (or Lack of it)." *Joint U.S.-Korea Academic Studies*.
- Easley, Leif-Eric. (2017). "China's Charm Offensive on South Korea Is Starting to Work". *Foreign Policy*. Diakses dari <https://foreignpolicy.com/2017/11/13/chinas-charm-offensive-on-south-korea-is-starting-to-work/> pada tanggal 1 Agustus 2019.
- Hankyoreh*. (2017a). "Belt and Road Forum Signals Reopening of South Korea-China Diplomacy". Diakses dari http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/794810.html pada tanggal 2 Agustus 2019.
- Hankyoreh*. (2017b). "China Invites South Korean Government Delegation to Belt and Road Summit". Diakses dari http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/794583.html pada tanggal 2 Agustus 2019.
- Jung, Min Hee. (2017). "Lotte Faces 500 Billion Won Losses in China over THAAD Retaliation". *Business Korea*. Diakses dari <http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=18007> pada tanggal 19 Mei 2019.
- Kompas.com. (2017). "Sekarang, China jadi Negara Paling Dibenci Rakyat Korea Selatan." Diakses dari <https://amp.kompas.com/internasional/read/2017/03/21/14092351/sekarang.china.jadi.negara.paling.dibenci.rakyat.korea.selatan> pada tanggal 20 Juni 2019.
- Mutmainnah, Rosyina. (2018). "Hubungan Pemerintah Korea Selatan-Chaebol Pasca Penerapan Sanksi Tiongkok atas Penempatan THAAD 2016-2017". Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Meick, Ethan dan Nargiza Salidjanova. (2017). "China's Response to U.S.-South Korean Missile Defense System Deployment and its Implications". *U.S.-China Economic and Security Review Commission: Staff Research Report*.
- Permatasari, Decyani. (2019). "Analisis Penggunaan Three Nos oleh Korea Selatan untuk Mengatasi Boikot di Cina Akibat Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)". *Journal of International Relations, Vol. 5, No.1*.
- Snyder, Scott & See-Won Byun. (2017). "North Korea, THAAD Overshadow Beijing and Seoul's 25th Anniversary." *Comparative Connections*, Vol. 19, Issue 2: 81-90.
- Swaine, Michael D. (2017). "Chinese Views on South Korea's Deployment of THAAD". *China Leadership Monitor*, No. 52.
- Yonhap News Agency*. (2017). "Damage from China's Ban on S. Korean Tours estimated at 7.5 tln Won." Diakses dari <http://english.yonhapnews.co.kr/business/2017/12/03/0502000000AEN20171203004100320.html> pada tanggal 11 Mei 2019.

- Yonhap News Agency.* (2019). "(2nd LD) Xi Says Many Things Possible from China-S. Korea Cooperation". Diakses dari <https://en.yna.co.kr/view/AEN20190627010952315> pada tanggal 20 juli 2019.
- Yonhap News Agency.* (2017). "(LEAD) Military, Lotte Sign Land-swap Deal for THAAD Deployment". Diakses dari <https://en.yna.co.kr/view/AEN20170228004051315> pada tanggal 1 Agustus 2019.